BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam GBHN bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan dilaksanakan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi.

Tujuan utama didirikan suatu negara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa serta mampu mencukupi kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membentuk suatu organisasi yaitu Pemerintah (*Governance*), yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diberi tugas dan wewenang mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat sekarang, seringkali ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan banyak perusahaan atau organisasi mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut, padahal harus diakui manusia adalah faktor penting yang turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Oleh

karena itu, keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga, bakat kreativitas dan semangat bagi organisasi serta memegang peranan penting dalam fungsi operasional organisasi.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting

dalam menghadapi pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehinggga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim, 2002:127-130).

Rasio keuangan dipergunakan untuk membandingkan resiko dan "*return*" perusahaan yang berbeda disamping membantu investor dan kreditur dalam membuat keputusan-keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut

berasal dari perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan membandingkan perusahaan lain dalam bidang yang sama.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD 3. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) 4. Rasio Pertumbuhan (Ihyaul Ulum M.D, 2009:30).

Penyediaan infrastruktur tata kota seperti jalan raya, gedung dan taman kota yang akan menjadi bahan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, dimana dengan infrastruktur yang lengkap dan akses yang cepat menarik investor mendirikan perusahaan di daerah sehingga dapat berdampak pada kemajuan perekonomian daerah.

Tata kota yang rapi dan mampu untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, membutuhkan perencanaan tata kota yang bisa membuat hal tersebut menjadi kenyataan, oleh sebab itu pemerintah daerah (Pemda) harus memperhitungkan perencanaan kota secara matang dengan

mempersiapkan pegawai yang memiliki kompetensi dan mampu untuk menjawab tantangan tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bappeda adalah salah satu diantara lembaga-lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

Setiap organisasi tentu saja mempunyai tujuan atau target yang harus dicapai. Suatu organisasi dalam melakukan aktivitasnya hendaklah memiliki seseorang pemimpin yang handal sehingga mampu mengantisipasi dan menentukan masa depan serta dapat mengambil peluang dari perubahan yang ada. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang memiliki keunggulan sehingga dapat menggiring organisasi dan para staf untuk sampai pada tujuan yang telah dibuat bersama-sama.

Keberadaan pemimpin dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya

terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Peranan pemimpin dan sumber daya manusia dalam organisasi sebenarnya telah ada sejak dikenalnya organisasi sebagai wadah bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang menjadi tujuan. Efektivitas adalah sesuatu yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Kata “kinerja” belakangan ini menjadi topik hangat di kalangan pengusaha dan kalangan administrator. Kinerja seakan menjadi sosok yang bernilai dan telah dijadikan tujuan pokok pada organisasi badan usaha. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan produktivitas lembaga atau organisasi.

Kinerja manajerial merupakan prestasi yang dicapai oleh suatu institusi melalui serangkaian proses atau kerangka kerja yang melibatkan suatu kelompok atau orang-orang sebagai suatu kesatuan bisnis untuk mencapai tujuan dari institusi atau organisasi yang bersangkutan selama periode tertentu. Penilaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen program keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tertentu.

Efektivitas kinerja aparatur negara di daerah pada umumnya sangat rendah/kurang baik, hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sebanyak 98 desa di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih tertinggal karena terhambatnya perkembangan ekonomi, masalah sarana dan insfratruktur, jarak geografis dari ibukota Tasikmalaya dan pelayanan kesehatan yang kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi masyarakat agar terlepas dari kemiskinan.

Untuk mengurangi masyarakat miskin yang berada di desa tertinggal, salah satunya dengan memanfaatkan dan menjalankan Program Nasional Pemberdaayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan baik dan tepat sasaran. Sementara itu upaya pemberdayaan masyarakat desa akan terus berlanjut dengan menambahkan anggaran. Tahun anggaran 2010 setiap desa harus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang dan jembatan penyeberangan yang masih kurang serta akses membangun perekonomian daerah yang masih terhambat yang dikarenakan penggunaan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang belum efektif.

Dengan melihat kinerja pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kurang baik, kritik masyarakat umumnya berkisar pada lemahnya kinerja dan profesionalisme birokrasi, prosedur

pengurusan yang berbelit-belit dan pungutan liar disana sini. Bahkan layanan pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin dan penyandang cacat lebih parah lagi. Hal ini merupakan dampak dari kinerja Bappeda yang kurang baik,

Penelitian sebelumnya dari Anton Arifiandi (2006) yang berjudul "Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD ", survey pada Pemerintah Daerah Grobogan, yang menyatakan bahwa bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan belum berhasil. Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini dilihat dari variabel Y nya, sampel yang digunakan dan juga adanya perbedaan tempat survey.

Berdasarkan masalah yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya.

Rasio keuangan yang akan digunakan oleh penulis yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang akan memperlihatkan baik atau buruknya kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya".**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengidentifikasikan masalah di dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pembangunan infrastruktur belum optimal, seperti memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang dan jembatan penyeberangan yang masih kurang, serta akses membangun perekonomian daerah yang masih terhambat yang dikarenakan penggunaan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang belum efektif.
2. Kinerja aparatur pemerintahanan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya sangat rendah/kurang baik, ini dapat dirasakan baik dari pelayanan yang lamban, fasilitas yang tidak memadai dan penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana rasio efektivitas keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya?
3. Seberapa besar pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh analisis rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bukti empiris atas analisis rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dan

diharapkan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti, berguna untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang luas dan lebih jelas mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan teori yang ada, memberikan penulis pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia kerja, serta menyelesaikan pendidikan Strata 1 program Studi Akuntansi.
2) Bagi instansi yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan efektivitas kinerja daerah agar terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi.
3) Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi dan bahan informasi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya Jl. Oto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan mulai Februari 2010 sampai dengan Juli 2010.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2010 samapi dengan Juli 2010. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pelaksanaan Penelitian
Di Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Feb. 2010	**Mar. 2010**	**Apr. 2010**	**Mei 2010**	**Juni 2010**	**Juli 2010**
I	**Tahap Persiapan:** 1. Membuat *outline* dan Proposal Usulan penelitian						
	2**.** Pengambilan formulir dan penyusunan UP						
	3. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan:** 1. Membuat *outline* dan Proposal UP						
	2**.** Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3. Penelitian di perusahaan						
	4. Penyusunan dan bimbingan UP						
III	**Tahap Pelaporan:** 1. Menyiapkan *draft* skripsi						
	2**.** Sidang Akhir skripsi						
	3. Revisi laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						